

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Masyarakat**

##### **2.1.1 Pengertian Masyarakat**

Dalam bahasa Inggris, "*society*" adalah kata benda untuk masyarakat. Menurut (Nurmansyah, Rodiyah, & Hapsari, 2019), masyarakat pada hakikatnya merupakan kumpulan kehidupan manusia dari berbagai kelompok individu yang saling berhubungan satu sama lain dan memiliki kepentingan serta cita-cita yang sama. Linton (dalam Dwi Iriani Marganingsih: 2018) mendefinisikan masyarakat sebagai sekelompok orang yang telah hidup berdampingan dalam waktu yang cukup lama dan berkolaborasi untuk menciptakan sebuah komunitas yang memiliki kapasitas untuk mengontrol setiap individu dan mengatur masyarakat secara keseluruhan. Cara lain untuk mengonseptualisasikan masyarakat adalah sebagai kumpulan individu dengan minat yang sama dan latar belakang budaya yang unik. Selain memiliki minat yang sama, masyarakat digambarkan sebagai kumpulan orang yang disatukan oleh tujuan bersama (Maryani & Nainggolan, 2019).

Selain itu, masyarakat adalah kumpulan individu yang hidup bersama dan melakukan interaksi sosial. Pengetahuan ini sejalan dengan pernyataan Widajaja bahwa manusia dan lingkungan masyarakat merupakan tempat di mana manusia hidup saling berinteraksi satu sama lain dan saling terkait erat (Dianti, Waluyati, & Fatimah, 2020). Masyarakat merupakan kelompok manusia yang memiliki kesamaan karakteristik yang mengarah pada kehidupan bersama, seperti kesamaan budaya, adat istiadat, tempat asal, kebiasaan, sikap, dan rasa kebersamaan (Prasetyo & Irwansyah, 2020). Oleh karena orang-orang ini memiliki kesamaan satu sama lain, mereka dapat hidup berdampingan dan berkomunikasi satu sama lain.

Berdasarkan perspektif dari beberapa ahli di atas, masyarakat dapat didefinisikan sebagai kumpulan individu yang memiliki minat dan aspirasi yang sama, sehingga memungkinkan mereka untuk hidup berdampingan.

### **2.1.2 Karakteristik Masyarakat**

Mengingat bahwa manusia adalah makhluk sosial secara alami dan akan terus berinteraksi dengan orang lain sepanjang hidup mereka, manusia dapat dianggap sebagai makhluk sosial yang tidak dapat bertahan hidup sendirian (Dianti, Waluyati, & Fatihah, 2020). Manusia hidup dalam masyarakat di mana mereka terhubung dengan orang lain secara teratur dan berbagi adat istiadat, budaya, sikap, sentimen, dan aspirasi serta memiliki kepentingan yang sama (Prasetyo & Irwansyah, 2020).

Menurut Soerjono Soekanto (2003), terdapat ciri-ciri atau sifat-sifat dari masyarakat itu sendiri yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Manusia yang hidup berkelompok  
Karena saling ketergantungan, kelompok ini akan bergabung bersama sebagai entitas publik. Komunitas adalah rumah bagi manusia dan spesies lain yang hidup berdampingan.
- b. Melahirkan Kebudayaan  
Budaya tidak akan ada tanpa masyarakat. Budaya adalah produk masyarakat dan ditransmisikan dari generasi ke generasi melalui berbagai mekanisme penyesuaian.
- c. Mengalami perubahan  
Peradaban dapat berubah sebagai hasil dari penemuan-penemuan baru. Tidak diragukan lagi bahwa semua aspek masyarakat berkembang. Misalnya perubahan sosial, yang mungkin memerlukan modifikasi pada interaksi sosial, teknologi, norma, dan cita-cita.
- d. Manusia yang berinteraksi  
Komunitas harus terlebih dahulu menggabungkan hubungan dan kolaborasi di antara para profesional, karena hal tersebut akan mengarah pada interaksi. Ketika budaya menyatu, komunikasi lisan dan tulisan menjadi sangat penting.

- e. Terdapat sebuah kepemimpinan  
Kepala rumah tangga, kepala kota, kepala negara, dan lainnya merupakan pemimpin di sini. Karena pemilihan ketua atau pemimpin masih bergantung pada keturunan, budaya Melayu pada awalnya memiliki struktur kepemimpinan yang tertutup.
- f. Adanya stratifikasi sosial  
Stratifikasi sosial atau lapisan masyarakat melibatkan memberi seseorang status dalam masyarakat serta peran untuk dimainkan karena masyarakat berfungsi sebagai wadah bagi orang-orang untuk mengejar berbagai kepentingan dan tentu saja untuk bertahan.

### **2.1.3 Peran Masyarakat**

Di tengah-tengah lingkungan masyarakat, masyarakat memiliki peranan-peranan yang perlu dilakukan. Peran adalah seperangkat tindakan yang seharusnya ditunjukkan oleh diri sendiri atau kelompok sosial. Individu atau kelompok orang menjalankan peran dalam suatu peristiwa (Andinasari, 2019).

Setiap orang adalah anggota masyarakat, di mana mereka semua memiliki tugas, hak, dan fungsi yang sama. Dalam hal pengelolaan dan perlindungan lingkungan, masyarakat berperan sebagai berikut di lingkungan masyarakat (Fatmawati, Purnaweni, & Luqman, 2020) yaitu:

- a. Pengawasan sosial  
Secara bersama-sama, masyarakat mengelola, dan mengawasi kejadian, serta melaporkan setiap potensi pelanggaran atau masalah yang mungkin terjadi di wilayah mereka. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa masyarakat secara keseluruhan mengawasi, memantau, dan melaporkan setiap tanda-tanda pelanggaran di sekitarnya.
- b. Pemberian saran, pendapat, usul, keberatan dan pengaduan  
Pemberian masukan, ide, dan saran dilakukan sebagai upaya demokratisasi pengambilan keputusan untuk mendukung para pengambil keputusan agar keputusan yang diambil dapat didengar dan diterima oleh individu atau lembaga terkait.

c. Penyalpaian informasi dan/atau laporan

Masyarakat harus benar-benar berbagi informasi dengan pemerintah agar pemerintah dapat lebih tanggap, cepat dalam menyalpaikan informasi tentang masalah lingkungan, dan memungkinkan tindakan yang cepat. Pengetahuan yang mendalam tentang suatu isu lingkungan juga dapat diperoleh melalui pertukaran informasi, baik dari para ahli di lapangan (kearifan lokal) maupun dari para ahli lain yang perspektifnya dihargai oleh masyarakat untuk membuat penilaian yang lebih baik atau mengambil tindakan yang lebih baik.

## **2.2 Lingkungan Hidup**

### **2.2.1 Pengertian Lingkungan Hidup**

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan cara-cara mereka berinteraksi dengan alam serta kelangsungan perikehidupan. Lingkungan yang memiliki dampak terhadap perilaku dan perkembangan manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung, disebut sebagai lingkungan hidup (Wihardjo & Rahmayanti, 2021). Lebih lanjut, salah satu definisi lingkungan hidup adalah tempat makhluk hidup berinteraksi satu sama lain untuk bertahan hidup. Keselarasan komponen yang membentuk suatu proses kehidupan, seperti makhluk hidup, keadaan di luar, dan kekuatan yang saling berinteraksi, merupakan hal yang membedakan sebuah lingkungan (Siregar & Nasution, 2020).

Lingkungan hidup dapat dikategorikan menjadi tiga yaitu lingkungan alam, lingkungan sosial, dan lingkungan buatan (Wihardjo & Rahmayanti, 2021).

a. Lingkungan alam

Segala sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan melekat pada alam, termasuk iklim, suhu, kualitas udara, musim, curah hujan, flora dan fauna, serta sumber daya alam lainnya, disebut sebagai lingkungan alam.

b. Lingkungan sosial

Lingkungan sosial terdiri dari institusi, simbol, konvensi, dan interaksi sosial lainnya di antara berbagai kelompok yang berbeda yang berhubungan dengan lingkungan alam dan lingkungan buatan.

c. Lingkungan buatan

Lingkungan yang diciptakan oleh manusia untuk dirinya sendiri, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, dikenal sebagai lingkungan alam.

Selain itu, menurut Ismail Yusuf bahwa terdapat tiga unsur lingkungan hidup yang mana ketiga unsur tersebut saling terikat (Yusuf, 2020).

a. *Biotik Community*, merupakan kelompok atau komunitas makhluk hidup, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan.

b. *Abiotik Community*, yaitu komunitas yang terdiri dari benda-benda mati seperti batu, gas, air, udara, dan sebagainya.

c. Ekosistem, merupakan hasil dari komunitas biotik dan abiotik yang saling mempengaruhi satu sama lain.

Dengan menggunakan konsep yang dipaparkan di atas, dapat dikatakan bahwa lingkungan hidup adalah suatu kesatuan ruang hidup yang berinteraksi dengan lingkungannya dan mengandung unsur atau komponen yang membentuk dan menopang proses kehidupan. Manusia harus selalu ingat bahwa lingkungan hidup adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang nilainya tidak terukur. Suatu anugerah atau karunia tidak ada gunanya jika tidak dapat dijaga.

### **2.2.2 Fungsi Lingkungan Hidup**

Lingkungan sangat penting bagi kehidupan manusia. Peran lingkungan dalam menopang kepentingan manusia dan memungkinkan kehidupan manusia di suatu lokasi adalah hal yang memunculkan pentingnya lingkungan, yang juga dapat dianggap berkontribusi terhadap kesejahteraan manusia. Selain itu, lingkungan berfungsi sebagai sumber daya yang beragam yang dapat digunakan dalam proses manufaktur untuk menghasilkan berbagai produk dengan kemampuan tertentu.

Keberadaan ekosistem lain, baik hayati maupun non-hayati, sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Manusia sangat membutuhkan sumber daya alam hayati untuk makanan, obat-obatan, pakaian, dan tempat tinggal agar dapat menjalani kehidupan yang penuh dan bermakna. Manusia membutuhkan bakteri atau mikroorganisme lain untuk membantu pencernaan secara teratur. Mikroorganisme juga bermanfaat untuk menyuburkan tanah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa lingkungan melayani berbagai tujuan bagi manusia dan makhluk hidup lainnya untuk bertahan hidup, termasuk tujuan ekologi, ekonomi, dan sosial budaya (Sood, 2019).

a. Fungsi ekologi

Lingkungan sangat penting bagi kelangsungan hidup semua kehidupan di Bumi, termasuk kehidupan manusia. Agar lingkungan tetap bersih dan sehat-lingkungan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia dan juga kehidupan makhluk hidup lainnya-manusia harus tetap menjaga, melestarikan, dan melindunginya.

b. Fungsi ekonomis

Sumber daya alam hayati dan non-hayati yang terdapat di lingkungan telah dimanfaatkan oleh manusia untuk mempertahankan eksistensinya. Lingkungan hidup dapat dimanfaatkan untuk mempromosikan pariwisata dengan tujuan menghasilkan devisa, termasuk kawasan hutan, pesisir, dan laut.

c. Fungsi sosial budaya

Karena manusia adalah makhluk sosial, tindakan dan perilaku mereka terus dipengaruhi oleh lingkungan mereka. Selain itu, manusia selalu menghasilkan kreasi artistik yang meminjam dari atau dipengaruhi oleh lingkungannya. Akibatnya, individu terus-menerus mengeksploitasi lingkungan mereka untuk berbagai tujuan untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Selain itu, (Hidayat, 2015) menegaskan bahwa lingkungan berfungsi yaitu pertama sebagai ruang eksistensi bagi semua makhluk hidup, terutama manusia. Ruang ini mencakup elemen fisik dan estetika, yang pada manusia berkembang sebagai dimensi fisik, spiritual, dan budaya. Penyediaan berbagai kebutuhan bagi

manusia dan makhluk hidup lainnya oleh lingkungan merupakan peran kedua. Makhluk hidup, terutama manusia, membutuhkan berbagai hal dari lingkungannya. Karena lingkungan terdiri dari materi dan energi yang menghasilkan sumber daya alam yang dibutuhkan manusia, maka manusia dapat menggunakan apa yang ada untuk mendukung kehidupannya.

## **2.3 Masalah Lingkungan**

### **2.3.1 Pencemaran Lingkungan**

Manusia adalah makhluk hidup dan komponen utama dari lingkungan, maka lingkungan dan manusia saling berkaitan. Kegiatan manusia dapat diklasifikasikan sebagai kegiatan ekonomi karena kegiatan tersebut digambarkan sebagai apa yang dilakukan orang untuk mencari nafkah demi menghidupi diri sendiri dan keluarganya (Siregar & Nasution, 2020). Bukti-bukti yang ada menunjukkan bahwa hewan yang paling bergantung pada lingkungannya adalah manusia (Rusdiana, 2015).

Kegiatan sehari-hari manusia ditentukan oleh keberadaan sumber daya alam. Di sisi lain, tindakan manusia seperti perusakan lingkungan juga memiliki dampak yang signifikan terhadap ketersediaan sumber daya dan ekosistem di sekitarnya. Keadaan ekosistem ditentukan oleh perilaku manusia (Purba & Yunita, 2017). Ketidaktahuan manusia akan cara melindungi, mengelola, dan melestarikan ekosistem itu sendiri dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan (Purba & Yunita, 2017). Ada beberapa contoh bagaimana aktivitas manusia telah merusak ekosistem, termasuk kerusakan tanah, air, dan hutan. Masalah-masalah tersebut saling berkaitan dan pada akhirnya akan berdampak pada manusia secara langsung (Ridwan, Hidayanti, & Nilfatri, 2021).

Topik tentang bagaimana manusia berinteraksi dengan lingkungan masih diperdebatkan dan bahkan telah mendapatkan perhatian internasional. Pada abad ke-21, masalah lingkungan muncul dari kontrol manusia terhadap alam, yang digunakan semaksimal mungkin untuk melayani kepentingan dan kebutuhan manusia. Selain itu, hal ini juga dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya

pencemaran lingkungan karena kemajuan penelitian dan penggunaan teknologi yang tidak ramah lingkungan (Rusdiana, 2015).

Menurut Hari Sutrisno (dalam Dale Dompas Sompotan dan Janes Sinaga: 2022) masalah yang mempengaruhi semua orang dan harus diselesaikan karena mengancam kesehatan, keselamatan, dan eksistensi manusia. Masuknya atau dimasukkannya organisme, zat, energi, dan/atau unsur lain ke dalam lingkungan hidup dengan sengaja atau tidak sengaja ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga menurunkan kualitas lingkungan hidup dan mengganggu kemampuan lingkungan hidup untuk berfungsi sesuai dengan peruntukannya disebut sebagai pencemaran lingkungan hidup (Ridwan, Hidayanti, & Nilfatri, 2021).

Lebih lanjut, menurut *Royal Commission on Environmental Pollution* di Inggris, pencemaran lingkungan didefinisikan sebagai ketika manusia memasukkan bahan atau energi ke dalam lingkungan yang dapat membahayakan kesehatan atau kesejahteraan manusia, merusak sumber daya hayati dan sistem ekologi, merusak bangunan atau infrastruktur lainnya, atau menghalangi penggunaan lingkungan yang sah (Appannagari, 2017). pencemaran lingkungan juga dapat didefinisikan sebagai benda asing yang mengubah komposisi alami dan karakteristik lingkungan dan memberikan risiko langsung atau tidak langsung kepada manusia dan makhluk hidup lainnya (Cao, Chen, Dong, Xie, & Liu, 2020). Pengertian tersebut sejalan dengan pendapat Mashood dalam (Khan & Ghouri, 2011) yang menyatakan bahwa pencemaran lingkungan adalah masalah yang meluas yang mungkin akan berdampak signifikan pada kesehatan masyarakat.

### **2.3.2 Faktor Penyebab Pencemaran Lingkungan Hidup**

Ada beberapa alasan mengapa pencemaran lingkungan dapat terjadi. Menurut (Susmarkanto, 2002), menyatakan bahwa pencemaran lingkungan dapat disebabkan oleh ulah masyarakat, industri, atau pelaku industri yang membuang limbah dan kotoran di sembarang tempat, termasuk sungai. Hal ini dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan air sungai, sehingga menyebabkan sungai mengalami pendangkalan dan penyempitan, yang memperbesar kemungkinan

terjadinya banjir di kemudian hari karena kemampuan sungai dalam menyerap dan mengalirkan air hujan ke laut sudah mulai menurun.

Selain itu, produk yang mengandung senyawa yang dapat merusak lingkungan juga dapat berkontribusi pada kontaminasi lingkungan, selain karena ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Sebagai contoh, beberapa hal, termasuk pestisida, emisi kendaraan bermotor, limbah industri tahu, dan sampah rumah tangga, berkontribusi terhadap pencemaran lingkungan, yang berdampak negatif terhadap kehidupan yang kita kenal (Siregar & Nasution, 2020).

Masalah kontaminasi lingkungan saat ini adalah hasil yang rumit dari beberapa kekuatan yang saling terkait dan elemen terkait. Sejauh menyangkut kontaminasi dan kerusakan lingkungan, tidak ada satu penyebab tunggal yang telah terbukti. Menurut (Appannagari, 2017) berikut ini penyebab umum dari kerusakan lingkungan, yaitu sifat teknologi kontemporer, penggundulan hutan, ekspansi pertanian dan industri, urbanisasi, penggunaan pembangkit listrik tenaga uap berbahan bakar batu bara, pertumbuhan populasi, kekayaan dan pertumbuhan ekonomi, dan kemiskinan.

Dari pandangan para ahli di atas, jelaslah bahwa berbagai variabel berkontribusi terhadap pencemaran lingkungan. Namun, elemen utama yang ditekankan adalah elemen manusia itu sendiri, karena keberadaan manusia bergantung pada lingkungan untuk bertahan hidup, namun ketergantungan ini tidak disertai dengan upaya untuk memelihara atau menjaga lingkungan.

### **2.3.3 Jenis-jenis Pencemaran Lingkungan**

Ketika zat-zat asing masuk ke dalam tanah, air, atau udara dan menimbulkan kerusakan yang membuat bahan-bahan tersebut tidak dapat digunakan, maka hal ini dikenal sebagai pencemaran lingkungan. Menurut Ramli dan Dewi Wahyuni (Utina, 2009) terdapat beberapa penggolongan pencemaran lingkungan, antara lain

a. Berdasarkan jenis lingkungan

Tergantung pada jenis lingkungannya, ada banyak jenis polusi: kebisingan (suara), udara, tanah, air, dan polusi laut.

- b. Berdasarkan sifat dari bahan pencemar  
Polusi fisik, kimia, dan biologi adalah tiga jenis polusi lingkungan yang diakibatkan oleh sifat unsur pencemar.
- c. Berdasarkan lamanya bahan pencemar yang bertahan dalam lingkungan  
Pencemaran lingkungan disebabkan oleh lamanya bahan pencemar, seperti plastik, kaleng, deterjen yang sulit terurai, dan unsur organik yang mudah terurai, berada di lingkungan.

Selain itu, keberadaan sampah atau elemen lain yang membahayakan lingkungan berkontribusi pada penurunan kualitas lingkungan. Menurut (Marganingsih & Hartono, 2021) ada tiga jenis pencemaran lingkungan, atau pencemaran yang ditimbulkan oleh sampah yang membahayakan lingkungan yaitu:

- a. Polusi air

Kebutuhan utama bagi semua makhluk hidup adalah air. Alih-alih memiliki rasa dan warna yang bersih, air yang tercemar malah menimbulkan bau yang tidak sedap dan bewarna (Marganingsih & Hartono, 2021). Ada yang berpendapat bahwa kemurnian air itu sendiri tidak menentukan apakah air tersebut murni atau tidak tercemar (Utina, 2009). Sampah, pestisida, bahan peledak yang digunakan dalam penangkapan ikan, serta limbah nuklir dan industri yang mengandung bahan kimia berbahaya semuanya dapat berkontribusi terhadap pencemaran air (Rofik & Mokhtar, 2021). Kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya akan terkena dampak pencemaran, khususnya pencemaran air, yang terlihat dari kematian tumbuhan dan spesies air (Marganingsih & Hartono, 2021).

- b. Polusi Udara

Masalah pernapasan dapat disebabkan oleh kontaminasi udara pada manusia dan makhluk hidup lainnya. Asap hasil pembakaran, termasuk dari pabrik, mobil, dan sumber lain yang mengeluarkan karbon monoksida, merupakan penyebab langsung kotornya udara. Menurut (Rofik & Mokhtar, 2021) menyatakan bahwa mobil dan kendaraan sejenis merupakan sumber utama pencemaran udara di Indonesia. Uap kotoran hewan baik urin, feses, maupun

sisia pakan ternak juga dapat dikategorikan sebagai penyumbang pencemaran udara karena mengeluarkan bau yang tidak sedap atau berbau busuk sehingga dapat mengganggu lingkungan sekitar karena udara yang terkontaminasi mengandung senyawa berbahaya, polusi udara juga dapat menyebabkan penipisan lapisan ozon.

c. Polusi tanah

Tanaman berkembang di tanah, dan sebagai media yang dapat memberi mereka nutrisi (Handayanto, Muddarisna, & Fiqri, 2017). Masuknya bahan kimia buatan ke dalam tanah dapat menyebabkan kerusakan struktural dan akhirnya membuat tanah yang terkontaminasi tidak dapat digunakan lagi. Tumpahan minyak, limbah industri, kotoran ternak, dan bahan beracun yang meresap ke dalam tanah merupakan penyebab utama pencemaran. Selain itu, tanah yang terkontaminasi akan mencemari air permukaan tanah, dan bahan berbahaya yang meresap ke dalam tanah dapat mencemari udara secara evaporasi (Marganingsih & Hartono, 2021). Menurut (Rofik & Mokhtar, 2021) bahwa unsur tambahan yang berkontribusi terhadap pencemaran tanah antara lain pupuk kimia, penggunaan pestisida berlebihan, senyawa asam, limbah industri dan pembangkit listrik tenaga nuklir, serta limbah rumah tangga seperti deterjen.

#### **2.3.4 Limbah**

Limbah diartikan sebagai bahan yang tidak berguna lagi akibat aktivitas manusia dan berasal dari rumah, tempat usaha, dan pertambangan. Karena limbah dapat memberikan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat dalam jumlah tertentu, maka limbah tersebut harus diolah dengan benar (Sunarsih, 2014). Kemudian, limbah dapat didefinisikan sebagai zat yang tersisa setelah produksi rumah tangga dan industri. Limbah diartikan sebagai sisa barang suatu industri atau perusahaan yang dibuang begitu saja.

Ada dua kategori limbah yang dapat dibedakan dari sudut pandang kimiawi: sampah organik dan anorganik. Limbah dapat berdampak buruk pada lingkungan, terutama pada kesehatan manusia, tergantung pada konsentrasi dan kuantitas

limbah ini (Sari, 2018). Oleh karena itu, diperlukan perhatian khusus untuk mengatasi masalah sampah

Lebih lanjut, menurut (Sitorus, et al., 2021) sampah didefinisikan sebagai limbah yang kehadirannya tidak diterima oleh lingkungan karena tidak memiliki nilai manfaat atau nilai ekonomi. Limbah diakui memiliki efek yang merugikan bagi lingkungan, terutama bagi kesehatan manusia, oleh karena itu limbah dipandang negatif. Limbah juga dapat didefinisikan sebagai produk sisa dari aktivitas manusia, baik itu aktivitas sehari-hari maupun industri, yang dibuang ke suatu tempat yang dapat membahayakan makhluk hidup lainnya.

## ***2.4 Civic Engagement***

### ***2.4.1 Pengertian Civic Engagement***

Limbah produksi dari PT Sun Sawit, sebuah perusahaan yang memproduksi minyak goreng, memiliki sejumlah dampak negatif. Diduga limbah dari minyak kelapa sawit mencemari lingkungan, menyebabkan air sungai tercemar dan bau tidak sedap menyebar ke kota-kota di sekitar PT Sun Sawit. Beberapa penduduk yang tetap memanfaatkan sungai untuk keperluan mereka telah mengalami dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat sebagai akibat dari air sungai yang kotor. Beberapa orang dewasa dan anak-anak mengalami penyakit kulit yang menyebabkan koreng dan gatal-gatal. Oleh karena itu, sulit bagi sekelompok kecil orang untuk menyelesaikan masalah ini sendiri. Untuk mengatasi masalah ini, sejumlah pemangku kepentingan harus terlibat.

*Civic Engagement* diartikan sebagai keterlibatan warga negara. Menurut Ramaley (dalam Richard P. Adler: 2005) definisi keterlibatan kewarganegaraan berbeda-beda tergantung dari sudut pandang dan tujuan orang yang mendefinisikannya. Diller mendefinisikan keterlibatan kewarganegaraan sebagai tugas seseorang untuk mengambil tanggung jawab kewarganegaraan dan komitmen untuk berpartisipasi secara aktif, baik secara individu maupun kelompok, dalam upaya sukarela yang meningkatkan komunitas tempat mereka tinggal

Keterlibatan kewarganegaraan (*civic engagement*) juga sering dikenal dengan sebutan Keterlibatan sipil/partisipasi warga negara (*civic participation*) adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perilaku individu dan kelompok orang yang mendukung kebijakan pemerintah dan berbagai inisiatif berbasis masyarakat (Fitrayadi & Rahman, 2020). Untuk membantu orang lain, warga negara berkolaborasi atau mengambil bagian dalam komunitas (Nurchotimah, Ulyan, & Kushardiyanti, 2021). Jika dilihat secara individu, keterlibatan masyarakat dipahami sebagai tindakan yang didorong oleh kepentingan pribadi, termasuk ketertarikan pada isu-isu sosial dan juga politik. Komponen penting dari partisipasi kewarganegaraan adalah seseorang yang secara aktif terlibat dalam masalah sosial atau urusan kewarganegaraan. Kemampuan suatu negara untuk tetap berkelanjutan sangat bergantung pada keterlibatan warganya, termasuk di dalamnya adalah respon masyarakat Desa Lingkis terhadap dampak limbah kelapa sawit.

Selain itu, *civic engagement* juga dapat dilihat sebagai keterlibatan warga yang melibatkan diri dalam kegiatan yang saling menguntungkan, membantu secara sosial, atau menguntungkan bagi kepentingan pribadi dan publik. Oleh karena itu, terlibat dalam komunitas dapat memberikan manfaat finansial dan sosial (Fitrayadi & Rahman, 2020). Selanjutnya, keterlibatan masyarakat juga mencakup partisipasi dan keterlibatan masyarakat, organisasi, dan lembaga dalam pengambilan keputusan, perencanaan, desain, tata kelola, dan pemberian layanan dalam batas-batas sosial masyarakat (Gilmore, et al., 2020). Kedua sudut pandang tersebut valid karena pelibatan masyarakat merupakan cara untuk mencapai pilihan atau rencana yang berguna untuk situasi yang muncul di masyarakat, yang mungkin menguntungkan bagi masyarakat secara keseluruhan. Keterlibatan masyarakat Desa Lingkis sangat penting dalam memitigasi kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh limbah kelapa sawit, karena mereka memainkan peran penting dalam keseluruhan situasi.

Definisi keterlibatan sipil (keterlibatan masyarakat) diciptakan oleh seorang ahli bernama Thomas Ehrlich (1997) yang kemudian digunakan dan diperluas.

Keterlibatan masyarakat didefinisikan sebagai proses keyakinan bahwa seseorang dapat dan harus membuat perubahan dalam meningkatkan komunitasnya (Doolittle & C.Faul, 2013). Untuk meningkatkan komunitas atau masyarakatnya, seseorang memerlukan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang diperlukan untuk membuat perubahan. Kepemilikan dan perwujudan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai tersebut diungkapkan melalui sikap dan/atau perilaku.

Definisi *civic engagement* yang dikemukakan oleh banyak ahli di atas bukanlah satu-satunya definisi yang ada. Menurut Ramaley, definisi keterlibatan sipil berbeda-beda menurut yang mendeskripsikannya. Berdasarkan sudut pandang para ahli di atas, dapat dikatakan bahwa keterlibatan masyarakat (*civic engagement*) adalah proses dimana warga negara terlibat dalam peristiwa-peristiwa lokal yang berpotensi membawa perubahan positif.

#### **2.4.2 Aspek-aspek *Civic Engagement***

Keterlibatan atau partisipasi individu yang diharapkan dan dianggap dapat membawa perubahan untuk memperbaiki masyarakat mereka dikenal sebagai keterlibatan masyarakat. Untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat semacam ini, seseorang harus memiliki nilai-nilai, pengetahuan, dan kemampuan yang diperlukan untuk melakukan perubahan. Cita-cita, pengetahuan, dan kemampuan tersebut ditunjukkan melalui sikap dan/atau tindakan. *Civic engagement* dikembangkan untuk menilai sikap dan perilaku, dua aspek yang berbeda dari keterlibatan (Doolittle & C.Faul, 2013). Keyakinan dan emosi pribadi yang dimiliki oleh orang-orang tentang posisi mereka di masyarakat dan kapasitas mereka untuk memberikan dampak positif dikenal sebagai sikap mereka. Tindakan yang dilakukan orang untuk secara aktif mencoba berpartisipasi dan meningkatkan komunitas mereka disebut sebagai perilaku komunitas (Doolittle & C.Faul, 2013).

#### **2.4.3 Bentuk-bentuk *Civic Engagement***

*Civic engagement* (keterlibatan masyarakat) dikenal juga dengan *civic participation* (partisipasi masyarakat) (Fitrayadi & Rahman, 2020). *civic engagement* merupakan suatu jenis partisipasi masyarakat dimana masyarakat mengungkapkan tujuannya baik secara langsung maupun tidak langsung (Suparno,

Sanul, & Ladamay, 2021). Kemampuan untuk secara sadar memilih, mengambil tindakan, dan kemudian merefleksikan aktivitasnya merupakan standar partisipasi (Rosyida & Nasdian, 2011).

Menurut Schuster dalam (Suparno, Sanul, & Ladamay, 2021) individu percaya bahwa mereka dapat berpartisipasi dalam lingkungan masyarakat dengan memberikan uang, tenaga, pandangan atau pemikiran mereka, atau keduanya. Beberapa orang bahkan percaya bahwa memberikan uang sama dengan berpartisipasi. Partisipasi secara umum dapat dilihat dari segi bentuk dan tingkatannya; bentuknya dapat berupa benda konkret atau bentuk yang tidak berwujud seperti konsep atau ide (Yeny, Murniati, & Suharti, 2020). Hurairah (2008) dalam (Yeny, Murniati, & Suharti, 2020) mengklasifikasikan bentuk-bentuk partisipasi, yaitu:

- a. Partisipasi ide atau pemikiran, yang dilakukan oleh peserta selama percakapan.
- b. Partisipasi tenaga, yang dilakukan oleh peserta dalam kegiatan langsung seperti pembangunan desa, gotong royong, dan sebagainya.
- c. Partisipasi harta benda, keterlibatan dalam inisiatif pengembangan dan peningkatan masyarakat, dan memberikan dukungan finansial, material, dan dukungan lainnya kepada mereka yang membutuhkan.
- d. Partisipasi keterampilan, yang berupaya mendukung berbagai perusahaan dan sektor
- e. Partisipasi sosial, atau keterlibatan yang diberikan oleh peserta sebagai isyarat kekeluargaan.

Selain itu, Wazir (1999) dalam (Ramanda, Hakim, & Pangestuti, 2019) mengklasifikasikan partisipasi berdasarkan bentuk dan tipenya yaitu:

- a. Partisipasi Pasif atau Manipulatif  
 Jenis partisipasi yang paling rendah adalah partisipasi pasif, yang tidak melibatkan keterlibatan aktif. Masyarakat diberi tahu tentang kejadian-kejadian yang terjadi dalam tipe ini. Namun, pemberi informasi menolak atau tidak mempertimbangkan reaksi masyarakat.

b. Partisipasi dengan Pemberian Informasi

Masyarakat hanya dapat berpartisipasi dalam kegiatan semacam ini dengan mengisi kuesioner atau formulir serupa. Masyarakat tidak diberi kesempatan untuk terlibat secara aktif dalam pemecahan masalah selama sisa waktu yang ada.

c. Partisipasi Melalui Konsultasi

Partisipasi pihak lain disebut sebagai konsultasi. Ketika pihak luar berkonsultasi dengan masyarakat, mereka mendengarkan masalah dan memberikan solusi. Dinyatakan bahwa tidak ada persentase pengambilan keputusan dalam jenis ini.

d. Partisipasi Intensif Materiil

Salah satu jenis pelayanan masyarakat yang dikompensasi adalah keterlibatan yang intens secara materiil. Individu mengambil bagian dengan menawarkan sumber daya mereka dengan imbalan pembayaran. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa komponen gaji merupakan hal yang memotivasi keterlibatan jenis ini.

e. Partisipasi Fungsional

Dalam jenis ini, individu-individu mengorganisir diri ke dalam kelompok-kelompok sesuai dengan tujuan yang ingin mereka capai. Orang luar biasanya masih terlibat dalam komunitas saat pertama kali terbentuk, tetapi pada akhirnya mereka tidak lagi diperlukan. Orang luar biasanya mempengaruhi keputusan dengan keterlibatan semacam ini.

f. Partisipasi Interaktif

Dalam partisipasi interaktif, masyarakat merencanakan dan mengorganisir kegiatan yang akan dilakukan dan memutuskan arah tujuan kegiatan. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan interaktif ini diyakini sangat penting karena keterlibatan semacam ini juga cenderung menginspirasi masyarakat untuk aktif.

g. *Self Mobilization*

keterlibatan di mana masyarakat memiliki peran yang paling besar dalam mengambil keputusan.

#### 2.4.4 Tingkatan *Civic Engagement*

*Civic engagement* (keterlibatan masyarakat) dikenal juga dengan *civic participation* (partisipasi masyarakat) yaitu semua tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok warga negara untuk mendukung berbagai jenis program dan kebijakan pemerintah dalam lingkup kehidupan masyarakat (Fitrayadi & Rahman, 2020). Tingkat partisipasi masyarakat dapat diukur dengan menggunakan tangga Arnstein. Tangga Arnstein pertama kali muncul dalam karya tulisnya “*A Ladder of Citizen Participation*” pada tahun 1969. Arnstein merumuskan tangga partisipasi dengan delapan anak tangga, sesuai dengan sejauh mana kekuasaan warga negara dalam menentukan produk akhir (Cardullo & Kitchin, 2019).

Tabel 2.1 Tangga partisipasi masyarakat dari Arnstein (1969) dalam (Indriani, Asang, & Hans, 2021)

| <b>Tingkatan Partisipasi</b> | <b>Hakekat Kesetaraan</b>   | <b>Pembagian Kekuasaan</b>       |
|------------------------------|---|----------------------------------|
| Manipulasi                   | Permainan oleh pemerintah   | Tidak ada partisipasi            |
| Terapi                       | Sekedar agar masyarakat tidak marah/sosialisasi                   |                                  |
| Pemberitahuan                | Sekedar pemberitahuan searah                                      | Tokenisme/<br>sekedar mengiyakan |
| konsultasi                   | Pendapat masyarakat didengar, tapi tidak ada jaminan akan dipakai |                                  |
| Penentraman                  | Saran masyarakat diterima tapi tidak selalu dilaksanakan          |                                  |
| Kemitraan                    | Negosiasi antara pemerintah dan masyarakat                        | Kekuasaan ada di masyarakat      |
| Pendelegasian kekuasaan      | Masyarakat diberikan kekuasaan tetapi masih ada peran pemerintah  |                                  |
| Kontrol masyarakat           | Kekuasaan sepenuhnya ada pada masyarakat                          |                                  |

Berikut ini delapan tangga partisipasi menurut Arnstein (1969) dalam (Cahyono & Mufidayati, 2021) yaitu:

1. Non-partisipasi
  - a. Manipulasi, pada tahapan ini alih-alih melibatkan masyarakat dalam rencana pemerintah, pemerintah justru mengundang mereka ke sebuah pertemuan untuk meminta dukungan. Dengan kata lain, tingkatan ini diartikan sebagai ketiadaan komunikasi.
  - b. Terapi, pada tingkatan ini masyarakat dan pemerintah hanya berkomunikasi satu arah pada tingkat ini. Namun, fokus utama pemerintah pada saat ini bukan pada keterlibatan masyarakat. Dengan demikian, pada tahap ini tidak ada keterlibatan masyarakat.
2. Tokenisme
  - c. Pemberitahuan atau Informasi, pada tahap ini, komunikasi masih bersifat satu arah; masyarakat diberitahu oleh pemerintah tanpa diberi kesempatan untuk menjawab.
  - d. Konsultasi, pada tingkat ini, masyarakat dan pemerintah berkomunikasi dua arah. Masyarakat dapat memberikan masukan, namun tidak ada jaminan bahwa pendapat masyarakat akan mempengaruhi keputusan pemerintah yang akan dijalankan.
  - e. Penentruman, dimana antara masyarakat dengan pemerintah telah terjalin komunikasi yang baik. Selain itu, masyarakat berhak dan berkesempatan untuk menyampaikan aspirasinya dan terlibat dalam suatu program, tetapi dalam tingkatan ini masih terdapat peran pemerintah.
3. Kekuasaan Warga Negara
  - f. Kemitraan, pada tahap ini, pemerintah dan masyarakat berkolaborasi atau bermitra. Dalam sistem di mana pilihan-pilihan dicapai melalui dialog antara pemerintah dan masyarakat, masyarakat memiliki hak untuk bernegosiasi dengan pemerintah
  - g. Pendelegasian, pada tingkatan ini, pemerintah memberikan izin kepada masyarakat untuk menangani urusannya sendiri. Selanjutnya, sebuah badan perwakilan mewakili masyarakat untuk mencapai tujuannya.

- h. Kendali Warga, yaitu dimana kekuasaan maksimum diberikan kepada masyarakat untuk mengawasi atau mengelola urusannya sendiri tanpa campur tangan pemerintah. Pada tahap ini, masyarakat juga memiliki kewenangan untuk mengawasi dan memberikan peringatan yang jelas jika terjadi pelanggaran atau masalah.

Sherry Arnstein menyamakan antara partisipasi dengan kekuasaan. Dengan kata lain, kekuasaan adalah kapasitas untuk memberikan dampak pada sebuah keputusan (Mubita, Libati, & Mulonda, 2017). Menurut Arnstein dalam (Mubita, Libati, & Mulonda, 2017) partisipasi adalah keterlibatan yang melibatkan pengalihan kekuasaan, di mana kaum miskin di masyarakat kontemporer dikucilkan dari ranah politik dan otoritas politik diberkahi dengan kewenangan untuk mengatur dan berdampak pada hal-hal yang memengaruhi kehidupan masyarakat.

Kekuatan yang direpresentasikan dalam setiap anak tangga partisipasi Arnstein menunjukkan tingkat pengaruh yang dimiliki warga terhadap pembangunan. Warga negara memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap hasil pembangunan jika mereka berada di tingkat yang lebih tinggi dalam hierarki sosial (Mubita, Libati, & Mulonda, 2017). Kategori terendah dari keterlibatan masyarakat adalah non-partisipasi (perlakuan dan manipulasi), yang bertujuan untuk mengelola dan membimbing masyarakat dengan mendidik dan mengarahkan mereka (Cardullo & Kitchin, 2019). Tujuan utama pada tingkat ini adalah untuk menenangkan masyarakat, bukan untuk mendorong keterlibatan masyarakat. Kemudian, tingkatan kedua dari keterlibatan ini dikenal sebagai tokenisme (menyampaikan informasi, konsultasi, dan penentruman) yaitu pada tingkat keterlibatan ini, masyarakat memiliki otonomi dan suara, tetapi mereka jarang dapat secara langsung mengubah arah pilihan dan rencana yang telah dibuat di tempat lain. Tiga anak tangga berikutnya, yaitu kekuatan warga (kemitraan, pendelegasian kekuasaan, dan pengawasan masyarakat), terkait dengan kekuatan warga dan memungkinkan warga untuk berbagi pengambilan keputusan dan memainkan peran aktif dan partisipatif (Cardullo & Kitchin, 2019).

Selanjutnya, sebuah teori keterlibatan masyarakat yang sesuai dengan pemerintahan daerah dibuat oleh Burns, Hambleton, dan Hogget (1994). Tangga pemberdayaan warga merupakan hipotesis yang dibuat oleh Burns dan rekan-rekannya. Tiga tingkatan keterlibatan masyarakat yang dikembangkan oleh Burns dkk. (1994) dalam (Samsir & Susanti, 2023) terdiri dari dua belas tingkatan yang lebih komprehensif. Tingkatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Non-Partisipasi Warga (*citizen non-participation*)

a. Penipuan warga

Hal ini seringkali terjadi dengan mendistorsi informasi, menyembunyikan sifat sebenarnya dari suatu peristiwa, dan masih komunikasi dalam bentuk satu arah.

b. Konsultasi sinis

Keterlibatan dipandang sebagai permainan. Meskipun partisipasi hanyalah formalitas karena pemimpin tidak benar-benar ingin masyarakat terlibat, namun para pemimpin sering kali memintanya.

c. Informasi yang buruk

Karena rendahnya kualitas atau sulitnya mengakses informasi yang diberikan oleh pemimpin, maka keterlibatan masyarakat menjadi terhambat.

d. Pemeliharaan pelanggan

Pemimpin mengambil tindakan ini untuk meredakan kemarahan masyarakat atas keluhan atas kualitas layanan yang diberikan.

2. Partisipasi warga (*citizen participation*), dimana masyarakat dapat mempengaruhi keputusan.

a. Informasi berkualitas

Dalam hal ini, para pemimpin masyarakat memiliki hak untuk memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat.

b. Konsultasi sejati

Masyarakat dilibatkan dalam pengambilan keputusan.

c. Badan penasihat yang efektif

Dalam hal ini, pemimpin beserta anggotanya bertindak untuk mendorong masyarakat agar mau menyampaikan pendapatnya.

d. Desentralisasi dalam pembuatan keputusan

Hal ini menunjukkan bahwa komunitas memiliki suara dalam pengambilan keputusan.

e. Kemitraan

Pemimpin yang mempraktikkan kemitraan mampu bekerja sama atau berkolaborasi dengan masyarakat. Selain itu, para pemimpin juga memberikan kewenangan kepada masyarakat.

f. Kendali yang didelegasi

Keputusan yang mempengaruhi masyarakat setempat dibuat dengan pengaruh besar dari masyarakat.

3. Kendali Warga (*citizen control*), dimana masyarakat memiliki wewenang untuk menjalankan lembaga, program, atau wilayah tertentu.

a. Kendali yang dipercayakan

Dengan kata lain, para pemimpin mempercayai organisasi masyarakat untuk mengambil inisiatif, berinovasi, dan menjalankan urusan mereka sendiri.

b. Interdependensi kendali

Dalam hal ini, kontrol dan pengawasan masyarakat diberikan.

Selain itu, Muluk (2007) juga memperkenalkan tangga partisipasi baru berdasarkan karakteristik pemerintah daerah di Indonesia. Muluk dalam (Daniati, 2020) mengategorikan keterlibatan ke dalam enam tangga: manipulasi, informasi, konsultasi, kemitraan, delegasi dan kendali warga.

1. Non-partisipasi

a. Manipulasi, dimana pemimpin membuat masyarakat terlihat terlibat atau diikutsertakan, tetapi pada kenyataannya, sama sekali tidak ada keterlibatan sama sekali.

2. Partisipasi, pada kategori partisipasi ini terdapat tiga tingkatan yaitu partisipasi lemah, sedang dan kuat.

- a. Partisipasi lemah, dalam tingkatan ini terdapat anak tangga yaitu informasi dimana para pemimpin mengedukasi masyarakat tanpa memberi mereka kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.
  - b. Partisipasi sedang terdapat anak tangga konsultasi dimana masyarakat diberi kesempatan untuk menyuarakan pendapat mereka untuk dipertimbangkan oleh pemimpin dalam mengambil keputusan. Namun, tidak mungkin keterlibatan masyarakat akan berdampak pada proses pengambilan keputusan pemimpin. Selain itu, para pemimpin memiliki kesempatan untuk berkolaborasi dengan masyarakat pada tingkat ini melalui kemitraan.
  - c. Partisipasi kuat, dalam kategori ini terdapat anak tangga yaitu delegasi dimana didefinisikan sebagai pemimpin yang menyerahkan kekuasaannya kepada masyarakat atau kelompok masyarakat.
3. Kendali Warga, kategori ini merupakan anak tangga tertinggi partisipasi dimana masyarakat memiliki wewenang untuk menetapkan kebijakan dan membuat pilihan.

Kemudian, Hamdi dan Goethert (1997) dalam (Pertena, 2011) mengklasifikasikan tingkat partisipasi menjadi lima tingkatan, yaitu:

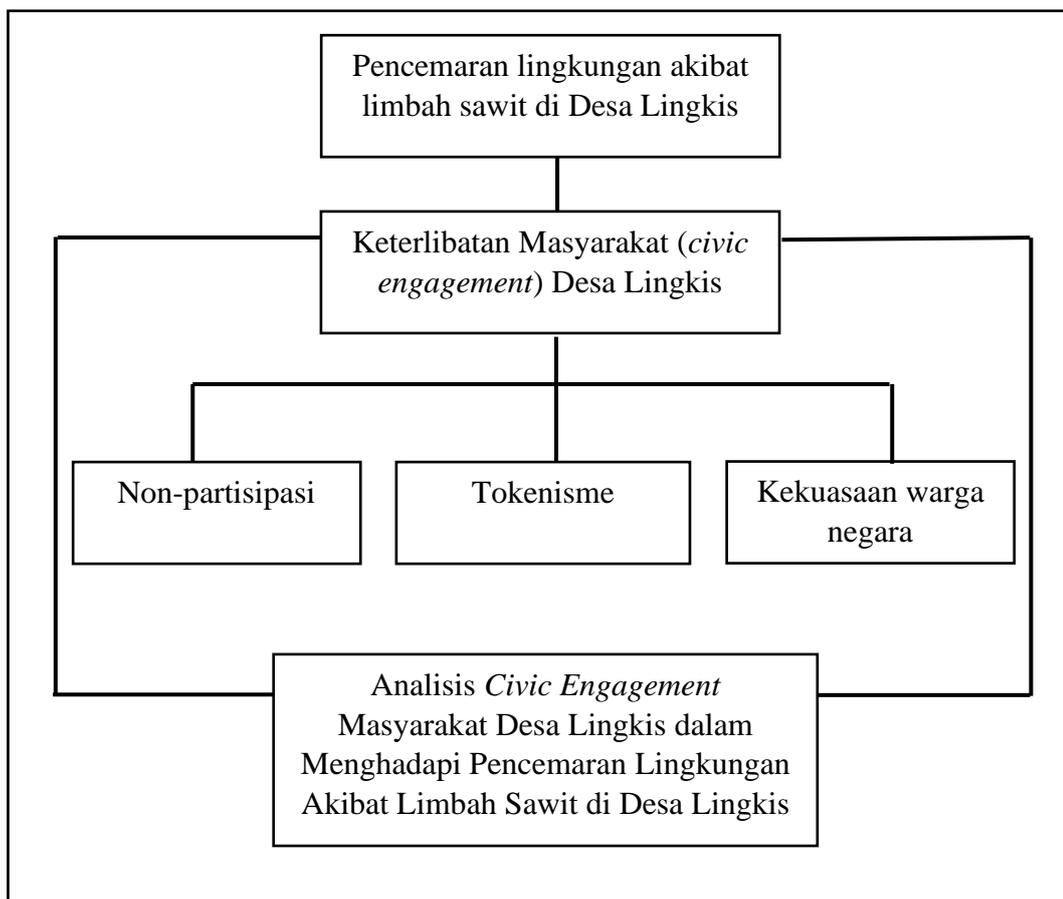
- a. *None*, yaitu tingkatan yang belum ada partisipasi dimana pemegang kekuasaanlah yang bertanggung jawab pada semua pihak.
- b. *Indirect*, adalah tingkatan dimana penguasa memerlukan informasi dari masyarakat untuk melaksanakan pembangunan. Namun, alih-alih berkomunikasi langsung dengan masyarakat, penguasa lebih menggunakan cara-cara lain seperti laporan dan sensus.
- c. *Consultative*, dalam tingkatan ini sudah ada komunikasi yang terjalin dengan masyarakat guna mengalih informasi. Namun, pada tingkatan ini masyarakat bertindak sebagai konsultan dan belum mempunyai kekuasaan untuk membuat sebuah keputusan.
- d. *Shared Control*, pada tingkatan ini antara penguasa dan masyarakat memiliki kedudukan yang setara. Masing-masing bertindak dengan dasar pemikiran

bahwa yang lain memiliki sesuatu yang berharga untuk dikontribusikan, dan mereka bekerja sama sebagai mitra untuk menghasilkan solusi kreatif.

- e. *Full control*, pada tingkatan ini masyarakat yang lebih mendominasi dan penguasa hanya sebagai pendukung.

## 2.5 Kerangka Berpikir

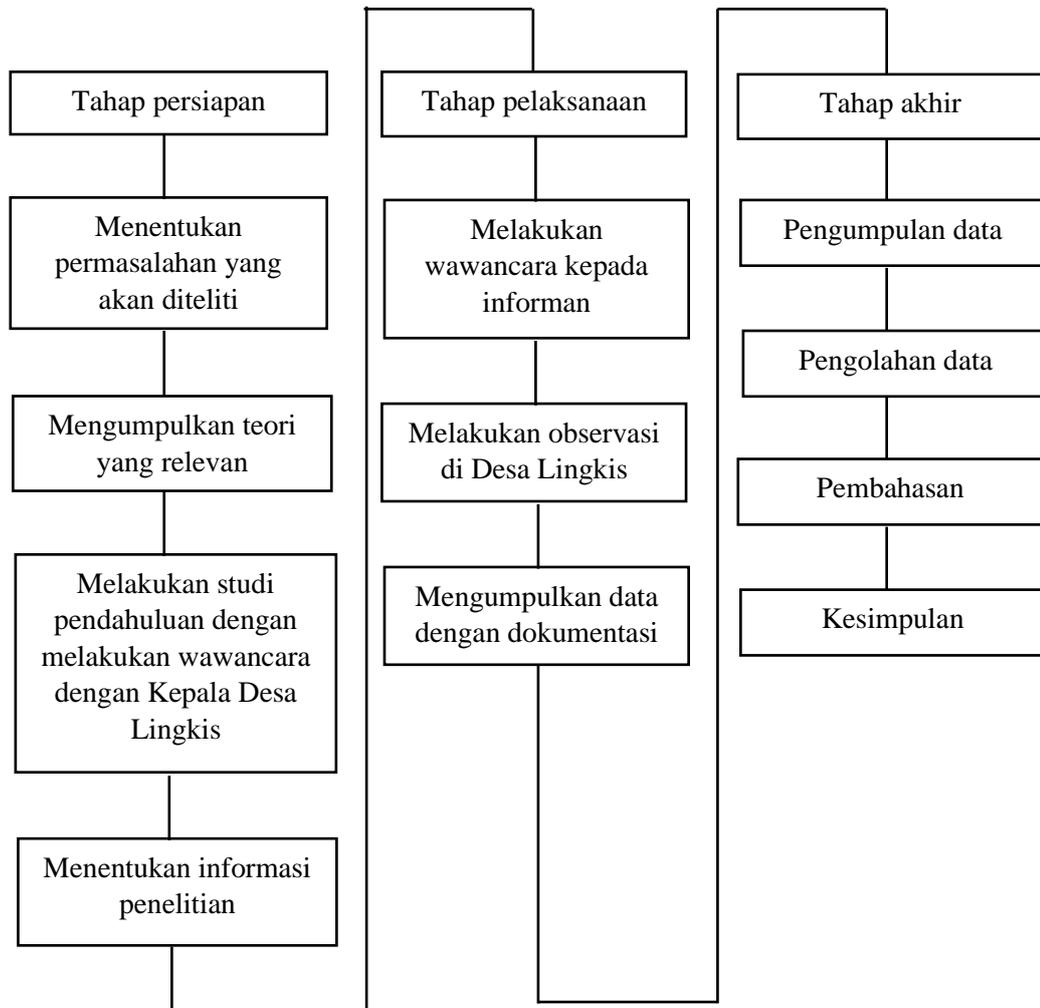
Kerangka pemikiran merupakan gambaran bagaimana penelitian yang akan kita lakukan dapat dimengerti dan dipahami dengan baik. Kerangka pemikiran yang baik akan menjelaskan bagaimana perbedaan variabel-variabel yang akan diteliti dapat dijelaskan secara teoritis dan akan menggambarkan hubungan antar variabel yang diteliti sehingga penelitian dapat dilakukan secara sistematis, terarah, dan dapat dipahami dengan tepat.



Bagan 2.1 Kerangka Berpikir

## 2.6 Alur Penelitian

Penelitian adalah gambaran tentang tahap-tahapan yang akan dikerjakan peneliti saat melakukan penelitiannya.



Bagan 2.2 Alur Penelitian